



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA
MASYARAKAT DESA PULAU BIRANDANG DENGAN
PT.SURYA PALMA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 DI DESA
PULAU BIRANDANG KECAMATAN
KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum di
Universitas Sultam Syarif Kasim



OLEH:

EMEL SALIM
NIM: 11527104537

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan Pt.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat"*

Nama : EMEL SALIM

NIM : 11527104537

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, S.H., M.H
NIK.19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT DESA PULAU BIRANDANG DENGAN PT.SURYA PALMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH-NOMOR 12 TAHUN 1999 DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPAR”, yang ditulis oleh:

Nama : **EMEL SALIM**
 NIM : 11527104537
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H.Erman M.Ag

Sekretaris
Joni Alizon,S.H.,M.H

Penguji I
Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II
Asril S.H.,M.H

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Emel Salim (2020): Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan PT.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar.

Penelitian dilatar belakangi oleh Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan Pt.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar.. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan PT.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar.dan apa Faktor terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Desa Pulau Birandang dengan PT.Surya Palma.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah Direktur PT.Surya Palma 1 orang, Kepala Desa Pulau Birandang 1 orang, kepala suku 1 orang,tokoh masyarakat 5 orang dan Badan Pertanahan Nasional 1 orang. dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian bahwa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan Pt.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar belum terlaksana dengan sempurna dan belum ada hasil yang di dapat oleh pihak tanah ulayat masyarakat Desa Pulau Birandang. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu perubahan Pola Pemikiran atau penguasaan atas tanah adat dan adanya perbedaan persepsi mengenai status tanah adat antara pemerintah dan masyarakat adat. Dalam penelitian ini yaitu kurangnya peran pemerintah daerah dalam hal menyelesaikan sengketa tanah ulayat sehingga permasalahan tersebut tidak terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segenap puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya kepada penulis berupa kesehatan, kesabaran, dan nikmatnya yang luar biasa serta ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan syalawat dan salam untuk junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad SAW, sebagai revolusioner islam, penyebar risalah-risalah Allah SWT dan sebagai pilar penegak janji-janji islam dipermukaan bumi ini, dengan mengucapkan *Allahuma sholli'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali syaiddina Muhammad*, Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran serta materi demi terciptanya tugas penulisan dan penelitian skripsi ini sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Kiranya dengan terciptanya penelitian ilmiah ini, diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah khasanah keilmuan penulis khususnya, maupun kepada pihak yang membaca penelitian ini pada umumnya.

Kemudian daripada itu penulis tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Hasan Basri dan Sumiati serta Abanghanda RediRes dan Adinda Astri Ayuni yang selalu bersabar dan memberikan doa dan semangat serta dukungan baik moril maupun materil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof.Dr.Hairunas,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.Zulkifli M.Ag Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.H. Maghfirah, MA Wakil Dekan III yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Firdaus SH.MH sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim SH sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Firdaus SH.MH selaku pembimbing Akademik penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Bapak Firdaus SH.MH sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan segenap civitas akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Segenap staf pegawai perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meminjamkan buku kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Dalisman Selaku kepala Desa Pulau Birandang yang telah membantu memberikan masukan mengenai penelitian ini.

10. Kepada saudari Madinah Pandiangan dan teman-teman sepejuangan saya yang berjasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan memotivasi selama penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya selaku penulis, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kata pengantar yang penulis persembahkan baik dari segi tata Bahasa maupun serta etimologis. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Penulis

EMEL SALIM
NIM.11527104537

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Kampar.....	21
B. Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Kampar	24
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan	32
B. Penguasaan Hak Atas Tanah	45
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan	47
D. Kebijakan Pemerintah	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat Desa Pulau Birandang dengan PT.Surya Palma berdasarkan peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1999.....	56
B. Faktor terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Desa Pulau Birandang dengan PT.Surya Palma.....	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi Bangsa Indonesia, hubungan manusia dengan tanah merupakan hak yang sangat mendasar dan asasi. Jika hubungan ini tidak tersusun dengan baik, maka akan lahir kemiskinan dan ketidakadilan bagi sebagian rakyat Indoneisa. Hubungan yang mendasar dan asasi dimaksud dijamin dan dilindungi keberadaannya oleh Konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya sebagai landasan kebijakan pertanahan di Indonesia ditetapkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang memiliki tujuan, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Angka I UUPA, dijelaskan bahwa: "Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Hukum agraria yang berlaku sekarang ini, seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat daripada tercapainya cita-cita di atas.¹

¹ Boedi Harsono, "Hukum Agrariaia Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrariaia, Isi dan Pelaksanaan", (Jakarta: 2008) , h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Oleh karena itu hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*.²

Masyarakat adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki harta ulayat secara turun temurun di daerah berbentuk persukuan, nagara, berbatinan, desa, kepenghuluan, kampong. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tradisi budaya, seni dan kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku yang mendiami nusantara ini. Oleh karena itu, setiap suku yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Untuk itu, tepatlah pemikiran pendiri bangsa ini

² Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan perancang Hukum Agraria menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional. Sebelum UUPA dan peraturan pertanahan lainnya keluar, hukum adat telah ada terlebih dahulu yang mengatur mengenai banyak hal termasuk tanah.³

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat telah diakui keberadaannya dan diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara”.⁵

Isi ke-dua pasal tersebut merupakan pengakuan keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dengan demikian, “landasan hukum yang dijadikan sendi-sendi dari Hukum Agraria Nasional adalah Hukum Adat menurut versi Undang-Undang Pokok Agraria”.⁶ Jelaslah bahwa keberadaan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang diakui berdasarkan UUPA masih

³ Boedi Harsono, “*Hukum Agrariaia Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrariaia, Isi dan Pelaksanaan*”, (Jakarta: 2008) , h. 45.

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, (Jakrta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 81

⁵ Ahmad Fauzie Ridwan, “*Hukum Tanah Adat-Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*”,(Jakarta: Dewaruci Press,1982), h. 12.

⁶ *Ibid* h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat ditemukan pada masa sekarang.⁷ Pengakuan yang lebih riil diberikan melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam UUPA.

Dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut "*beschikkingsrecht*". Bunyi selengkapnya Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut. *Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*⁸

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tersebut haruslah dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh pemimpin adat atau yang disebut dengan *Ninik Mamak* suatu persekutuan adat tersebut. *Ninik Mamak* berkewajiban dalam mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya

⁷ Ali Achmad Chomzal, "*Hukum Agraria*", Jilid I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004), h. 133.

⁸ Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persengketaan atau perkara adat. Oleh karenanya, mengenai persoalan hak ulayat peranan Ninik Mamak sangat menonjol karena Ninik Mamak akan lebih mengetahui dan mengerti tentang suatu kejadian yang ada dalam lingkup masyarakat adatnya dan juga akan lebih memahami tentang norma-norma atau aturan-aturan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat adatnya sendiri. Demikian juga halnya dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Desa Pulau Birandang, hak ulayat yang dikuasai oleh Ninik Mamak atau pemangku adatnya. Hak ulayat persukuan dikuasai oleh masing-masing kepala suku yang memiliki hak ulayat. Sedangkan hak ulayat Kenegerian dikuasai oleh pucuk adat Desa Pulau Birandang.

Pasal 2 (1) Peraturan daerah Nomor 12 tahun 1999 yaitu *”hak tanah ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa menurut ketentuan hukum adat yang berlaku disetiap tempat”*.⁹

Seperti yang di tuangkan dalam pasal 3 peraturan daerah nomor 12 tahun 1999 yaitu

- a. Agar tanah ulayat menjadi produktif dapat di berikan hak pola piker kemitraan pada pihak ke tiga
- b. Untuk memenuhi maksud ayat 1 pasal ini di lakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

⁹ Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Kesepakatan kedua belah di pihak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk melakukan perjanjian sebagaimana di maksud pada point a di atas

Didalam peraturan daerah No.12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulaya dalam pasal 15 di sebutkan;¹⁰

1. Berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dibentuk Badan Penyelesaian Permasalahan dan Pemutihan Tanah Ulayat Daerah yang bertugas Melaksanakan penertiban sebagaimana tercantum dalam pasal 14 (2)
2. Susunan keanggotaan Badan Penyelesaian Permasalahan dan Pemulihan Tnah Ulayat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari
 - a) Pihak Pemerintah Daerah
 - b) Pemangku adat dan Tokoh Masyarakat.

Yang diberikan oleh negara justru pembatasan-pembatasan yang mau tidak mau menjadi sebuah keharusan untuk ditaati oleh warga negara tak terkecuali masyarakat adat. Dengan adanya pembatasan tersebut pemerintah dalam politik hukumnya akan mengarahkan bahwa suatu saat nanti hak-hak adat akan hilang atau dihilangkan. Bahkan yang lebih *ekstrem* lagi dengan adanya pengakuan bersyarat dapat digunakan oleh pemerintah atau investor untuk merampas tanah masyarakat adat.

Hak Ulayat menurut Hazairin sebagaimana yang dikutip Sunaryati Hartono menyatakan hak ulayat suatu masyarakat (Hukum) adat (*rechtsgemeen schap*) yaitu “hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1999 pasal 14 tentang Hak Tanah Ulayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang bersangkutan, yang tidak akan pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi secara turun-temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah sekaligus hukum adat tersebut”.¹¹

“Hak perorangan adalah, hak yang dipunyai oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat di atasnya, baik yang berasal dari hak ulayat maupun dari hasil pencaharian”.¹²

Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang.¹³ Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, dikuatkan atas pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun dengan memperhatikan sisi dan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat menunjang kesejahteraan umum. Sehingga BPN berperan dalam membantu dan melayani masyarakat dalam mendapatkan haknya di bidang pertanahan,

¹¹ Sunaryati Hartono, *Pengaturan Hak Ulayat Dalam UUPA Yang baru. Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999) h.12

¹² Wignyodipoero Soeroyo. *Pengantar dan Azas-Azas hukum Adat.* (Jakarta: Gunung Agung, 1985),h.45

¹³ Budi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang –Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Djambatan: Jakarta, 2003), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

serta dalam membantu masyarakat untuk dapat menemukan jalan penyelesaian bila mana terdapat sengketa antar masyarakat mengenai haknya dibidang pertanahan.¹⁴

Selanjutnya, penggunaan istilah hukum adat ini juga digunakan oleh Van Vollenhoven. Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang merupakan hukum yang tidak tertulis dalam keadaannya yang berbhinneka yang mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.¹⁵

Hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama dan pluralistis, juga mengandung sifat yang sangat tradisional tertanam dan berakat dalam budaya bangsa Indonesia dapat berubah luwes, elastis, memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan diri, kenyal, berirama. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa mutlak hukum adat disuatu wilayah akan berubah jika ada penggantian pejabat (Ninik mamak/Pemangku Adat atau Penghulu Suku). Melainkan dimaksudkan bahwa dapat saja suatu hukum adat berubah karena ada pandangan baru dari penghulu/pemangku adat/pembesar adat dan sebagainya, yang diterima dan ditaati oleh masyarakat persekutuan hukum adat bersangkutan sebagai suatu

¹⁴ Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

¹⁵ A.Ridwan Halim., *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*. (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1987)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

norma baru, lebih modern atau lebih sesuai dengan perkembangan perasaan hukum masyarakat.¹⁶

Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain.¹⁷

1. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
2. Kasus kasus berkenaan dengan ekses ekses penyediaan tanah untuk perkebunan.
3. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.
4. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat

Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi antara lain disebabkan oleh:¹⁸

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah;
6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara lain:
 - a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal,
 - b. Sertifikat palsu,

¹⁶ Hilman Hadikusumo., "Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat", dalam Salindeho, Jhon, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Sinar Grafika, Jakarta: 1987). h. 239-240.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hilman Hadikusumo., "Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat", dalam Salindeho, Jhon, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Sinar Grafika, Jakarta: 1987). h. 245

- c. Sertifikat tumpang tindih (*overlapping*),
- d. Pembatalan sertifikat.

Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem alternative dispute resolution (ADR) yang telah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa: *“Penyelesaian perkara. di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap di perbolehkan”*¹⁹

Sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam bab XII Pasal 58 sampai Pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa di Luar Pengadilan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang disepakati para pihak seperti Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Bahwa Konflik ini sudah lama terjadi bahwa masyarakat Desa Pulau Birandang sangat kecewa kepada perusahaan PT.Surya Palma, masyarakat Desa Pulau Birandang memiliki legalitas atas tanah tersebut yakni surat dari kepala Desa serta SKPL dari Penguasa Ulayat Desa Pantai Cermin. Bahwa pada saat itu masyarakat desa Pulau Birandang juga pernah menyurati

¹⁹ Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pimpinan perusahaan bahkan surat tersebut ditembuskan kepada Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau dan Kapolda Riau bahwa masyarakat Desa Pulau Birandang mempertahankan lahan seluas lebih kurang 200 Hektar yang diserobot pihak Perusahaan agar di kembalikan, pernah pada saat itu ada kesepakatan antara kelompok masyarakat desa Pulau Birandang dengan pihak perusahaan membuat KKPA namun pada tak kunjung ada realisasi seharusnya bila ada kesepakatan itu batal dan tidak jadi harusnya lahan di kembalikan bukah malah di kuasai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ternyata di lapangan belum dilakukan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Karena aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua subjek hukum tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana tertuang pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (1). Serta pada pasal berikut:²⁰ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama* . Hal ini dapat pula diartikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum dan tidak ada suatu hal yang menjadikan sebagai alasan pembedanya. Dengan adanya suatu perlindungan hukum, maka hak-hak dari subjek hukum akan dilindungi. Dengan demikian maka subjek hukum akan merasa aman, dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Satjipto Rahardjo pada

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bukunya yang berjudul Ilmu Hukum mengatakan bahwa suatu perlindungan hukum dapat diartikan 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat (1). 14 memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, dan tujuan perlindungan hukum adalah memberikan masyarakat suatu rasa nyaman dan aman untuk menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum. Dari teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini dapat diartikan pula bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal yang bersifat melindungi subjek hukum dari hal-hal merugikan yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya. Sampai saat ini memang belum ada penyelesaian sengketa yang dilakukan namun sudah ada beberapa usaha yang dilakukan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Merujuk pada beberapa alternatif penyelesaian sengketa seharusnya mediasi dapat dilakukan karena mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution.

Dalam peralihan pengelolaan kawasan tersebut tidak ada proses yang jelas dan transparan maupun musyawarah terlebih dahulu dari masyarakat Desa Pulau Birandang. bahwa sengketa tanah yang terjadi di Desa Pulau Birandang telah di ambil alih oleh PT.Surya Palma tanpa ada musyawarah atau prosedur yang jelas. PT.Surya Palma mengambil tanah tersebut dengan sendirinya tanpa ada musyawarah kepada masyarakat Desa Pulau Birandang. Masyarakat pemilik kebun sawit tersebut mengakui di bahwa lahannya di serobot oleh PT.Surya Palma dengan menutup paret pembatas lahan dan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menanam patok beton secara illegal yang membela lahan masyarakat tersebut. dapat dilihat bahwa PT.Surya Palma telah melakukan dugaan tindakan melawan hukum dan kesewenang-wenangan dari perusahaan yang di duga tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan sawit di desa Pulau Birandang tersebut.

Sejauh ini belum ada proses penyelesaian sengketa tanah antara desa pulau birandang dengan PT.Surya Palma masyarakat meminta Pemkab Kampar serius menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan yakni PT SPS. "Dari tahun 1998 gejolak ini belum selesai. masyarakat berharap dibawah kepemimpinan Bapak Azis-Catur persoalan ini selesai dan masyarakat mendapatkan hak nya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengkaji lebih mendalam tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan tersebut dengan judul: PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT DESA PULAU BIRANDANG DENGAN PT.SURYA PALMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPAR.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat desa pulau birandang dengan PT. Surya Palma berdasarkan Peraturan Dearah Nomor 12 tahun 1999?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor terjadinya sengketa tanah antara masyarakat desa pulau birandang dengan PT. Surya Palma.

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. peranan pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat desa pulau birandang dengan PT. Surya Palma berdasarkan Peraturan Dearah Nomor 12 tahun 1999.
2. faktor terjadinya sengketa tanah antara masyarakat desa pulau birandang dengan PT. Surya Palma

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui peranan pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah Ulayat antara masyarakat desa pulau birandang dengan PT. Surya Palma berdasarkan Peraturan Dearah Nomor 12 tahun 1999
2. Untuk mengetahui Apa faktor terjadinya sengketa tanah antara masyarakat desa pulau birandang dengan PT. Surya Palma.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Salah satu syarat pokok guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
2. Merealisasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan dalam bentuk praktek
3. Sebagai bahan penelitian bagi penulis dan bermanfaat bagi penelitian yang sama atau permasalahan yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang metode-metode atau cara-cara tertentu yang harus ada dalam melaksanakan penelitian untuk tujuan tertentu.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang secara empiris di lapangan.²¹

Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa Ulayat antara Desa Pulau Birandang dengan PT.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Dearah Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII pres, 1986), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan sengketa antara Desa Pulau Birandang dengan PT.Surya Palma.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kampar dan dilakukan di Badan Pertanahan Nasional dan PT.Surya Palma karena pada saat dilakukan mediasi berada di Kantor Pertanahan Nasional. pengelolaan kawasan tersebut tidak ada proses yang jelas dan transparan maupun musyawarah terlebih dahulu dari masyarakat Desa Pulau Birandang.bahwa sengeta tanah yang terjadi di Desa Pulau Birandang telah di ambil alih oleh PT.Surya Palma tanpa ada musyawarah atau prosedur yang jelas. PT.Surya Palma mengambil tanah tersebut dengan sendirinya tanpa ada musyawarah kepada masyarakat Desa Pulau Birandang. Masyarakat pemilik kebun sawit tersebut mengakui di bahwa lahannya di serobot oleh PT.Surya Palma dengan menutup paret pembatas lahan dan menanam patok beton secara illegal yang membela lahan masyarakat tersebut.dapat dilihat bahwa PT.Surya Palma telah melakukan dugaan tindakan melawan hukum dan kesewenang-wenangan dari perusahaan yang di duga tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan sawit di desa Pulau Birandang tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang akan di teliti dengan menggunakan wawancara kepada yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan sengketa tanah ulayat. Dan ada pun obkjek penelitian yaitu Sengketa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah Desa Pulau Birandang dan PT.Surya Palma yaitu Direktur PT.Surya Palma, Kepala Desa Pulau Birandang,dan Tokoh masyarakat

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri sama.²² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Direktur PT.Surya Palma 1 Orang,Kepala Desa Pulau Birandang 1 orang, Kepala Suku 1 orang dan Tokoh Masyarakat 5 orang dan Badan Pertanahan Nasional 1 orang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Table 1.2
POPULASI DAN SAMPLE

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPLE	PERSENTASE
1.	Badan Pertanahan Nasional	1	1	100%
2.	Direktur PT.Surya Palma	1	1	100%
3.	Kepala Desa Pulau Birandang	1	1	100%
4.	Kepala Suku	1	1	5%
5.	Tokoh Masyarakat	5	5	100%
Jumlah		9	9	

Sumber Data Badan Pusat Statistik 2020

²² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,1990), h. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi jumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku atas informasi lainnya. Sumber data penelitian ini terdiri:

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau langsung dari objeknya.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan
- c. Data tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar.

6. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan dengan mengamati dan turun langsung lapangan terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu atau metode dengan cara bertanya langsung kepada

responden dilapangan yang berkenanaan dengan masalah yang diteliti yaitu Peran Pemerintah dalam menyelesaikan Sengketa Tanah Antara Desa Pulau Birandang dan PT.Surya Palma

7. Metode analisis data

Setelah data terkumpul dan dianalisa selanjutnya penulis menjelaskan data tersebut dengan metode deskriptif, yaitu peneliti yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.²³ Setelah itu data diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori sesuai dengan jenisnya. Kemudian di hubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang dibahas dengan mengemukakan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta mendapatkan gambran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Alfabeta, 2014) cetakan2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam bab ini membahas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran umum Desa Pulau Birandang, gambaran umum dan struktur PT.Surya Palma.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab tentang Peraturan Daerah, Sengketa, Tanah Ulayat Penyelesaian Sengketa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang peran Pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah antara Desa Pulau Birandang dengan PT.Surya Palma

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan penelitian dan saran untuk pihak yang terkait

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.²⁴

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956

²⁴ Pemerintah Kabupaten Kampar, Sejarah Singkat & Profil Kabupaten Kampar, (Kampar: HUMAS Pemkab Kampar, 2013), h 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No :02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain :

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten Kamp.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.
7. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinc Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.²⁵

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor : 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor : 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 61 tahun 1958 hanya

²⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten Kampar, maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan.²⁶

B. Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 211.289,28 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur.²⁷

²⁶ <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah> Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui Tanggal 20 November 1949. Selanjutnya 20 tanggal 20 Februari ,Kampar yang 20 setiap 20 tahun 2 diperingati.

²⁷ regionalinvestment.bkpm.go.id Profil Kabupaten Kampar (diakses pada 11 April 2012)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Batas Wilayah

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatra Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang.²⁸ Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan

²⁸ <http://www.hukumonline.com> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (diakses pada 11 April 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.²⁹ Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.³⁰

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh pasangan Gubernur H. Jefry Noer dan Wakil Gubernur H. Ibrahim Ali SH, yang ditetapkan oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk masa jabatan 2011-2016.³¹

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecamatan

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

- a. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai).
- b. Bangkinang Kota (ibu kota: Bangkinang).
- c. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
- d. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
- e. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
- f. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
- g. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
- h. Kampar Timur (ibu kota: Kampar).
- i. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah).
- j. Kuok (ibu kota: Kuok). Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
- k. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
- l. Salo (ibu kota: Salo).
- m. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
- n. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
- o. Tapung (ibu kota: Petapahan).
- p. Tapung Hilir (ibu kota: Kota Garo).
- q. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
- r. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat).
- s. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).

t. Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

3. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2021 tercatat 742,049 jiwa,³² yang terdiri dari penduduk laki-laki 382,756 jiwa dan wanita 359,293 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai *Ughang Ocu*, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau.³³ khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia*, 1953, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatra memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatra.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra permukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatra Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing –masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

4. Agama

Penduduk kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri dalam catatan kependudukan dan sipil hingga akhir tahun 2020 mencatat pemeluk agama Islam berjumlah 706.835 jiwa (89,44%) dari 790.313 jiwa penduduk. Selanjutnya pemeluk agama Kristen sebanyak 83.051 jiwa (10,51%), dimana Protestan 75.277 jiwa (9,53%) dan Katolik 7.774 jiwa (0,98%). Pemeluk agama Kristen banyak terdapat di kecamatan Tapung Hulu, Siak Hulu, Tapung Hilir dan Tapung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski pada umumnya semua kecamatan di kabupaten Kampar adalah mayoritas beragama Islam.³⁴



Rumah ibadah yang terdapat di kabupaten Kampar yakni rumah ibadah berupa masjid sebanyak 794 bangunan, musholah 1.169 bangunan. Masjid Jami Air Tiris, termasuk salah satu masjid tertua di Kabupaten Kampar. Gereja protestan berjumlah 234 bangunan, dan paling banyak berada di kecamatan Tapung yakni 74 bangunan gereja. Dan bangunan gereja Katolik berjumlah 21 bangunan.

5. Ekonomi

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat. Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0.22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan

³⁴ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layanan telekomunikasi (telepon kabel, telepon seluler, dan jaringan internet) dan jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³.³⁵

6. Pertanian

Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan yang ada di Kabupaten kampar.

7. Perkebunan

Khusus perkebunan perkebunan sawit untuk saat ini Kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hektare dengan potensi *crude palm oil* (CPO) sebanyak 966 ribu ton.

8. Perikanan

Di bidang perikanan budidaya ikan patin yang dikembangkan melalui keramba (kolam ikan berupa rakit) di sepanjang sungai kampar, ini terlihat banyaknya keramba yang berjejer rapi di sepanjang sungai kampardan adanya kerjasama antara Pemda Kampar dengan PT. Benecom dengan jumlah investasi Rp. 30 miliar yang mana kedepannya Kampar akan menjadi sentra ikan patin dengan produksi 220 ton per hari.

³⁵ Ibid

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

1. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama satu pentersekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. R. Supomo dan Hazairin berpendapat bahwa Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.³⁶

Sedangkan menurut Ter Haar, Masyarakat adat terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan geologis (keturunan). Masyarakat adat teritorial adalah masyarakat adat berdasarkan lingkungan daerah, apakah di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Sedangkan masyarakat adat berdasarkan genealogis adalah persekutuan masyarakat adat berdasarkan suatu keturunan(keluarga). Keanggotan persekutuan seorang bergantung pada apakah seorang itu masuk dalam satu keturunan yang sam atau tidak.

³⁶<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 Mei 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ter Haar mengemukakan bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal tersebut merupakan kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaa dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum. Inti perumusan Ter Haar dapat dikemukakan bahwa masyarakat hukum (persekutuan Hukum) adalah :

- a. Kesatuan manusai yang teratur,
- b. Menetap di suatu daerah tertentu
- c. Mempunyai penguasa-penguasa
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud.

Para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di anantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.³⁷

2. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Masyarakat adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu Hak Ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak Ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat memiliki dua unsur, yakni unsur kepunyaan yang termasuk kewajiban-kewajiban hukum perdata di dalamnya dan unsur-unsur kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk di bidang hukum mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk di bidang hukum.³⁸

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-

³⁷ Bushar Muhammad, *Asas-asas hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 21-22

³⁸ Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, (Semarang: Dunia Cerdas, 2014), h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat adat dengan tanah wilayahnya, yang disebut hak ulayat. Dalam perpustakaan hukum ada yang berbahasa belanda, mengikuti penamaannya oleh Van Vollenhoven, lembaganya disebut *beschikkingsrecht*. Hak ulayat mengandung dua unsur yaitu unsur kepemilikan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tugas kewenangan yang termasuk kewenangan hukum publik. unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³⁹

Hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat menganal tanah yang ditempatinya tidak saja sebagai sebuah benda yang bernilai ekonomi akan tetapi tanah dalam alam berfikir masyarakat adat juga merupakan benda yang memiliki nilai magis. Tanah dalam konsep hukum adat merupakan harga diri, dimana ditanah tersebut dimakamkan para leluhur masyarakat adat, ditanah tersebut mereka hidup dan berkembang, Kedekatan antara masyarakat adat dengan tanah yang menghidupinya menimbulkan hubungan emosional yang sangat erat. Budaya, etnis, tradisi nilai-nilai msyarakat adat berkembang sesuai dengan kedekatan masyarakat adat

³⁹ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Palu: Sinar Grafika, 2006), h 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada alam lengkungannya yang dalam hal ini juga termasuk tanah yang telah menghidupi mereka.⁴⁰

Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang sangat erat tersebut diartikan sebagai hubungan yang serba berpasangan (*particepeeren deneken*). Hubungan antara manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di pihak yang lain yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan, dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup. Termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya bergantung padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan dan berakar dalam alam pikirannya serta berpasangan dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbetrekking*).

Dalam konsep penguasaan tanah menurut hukum Adat, penguasaan tanah dan pemilikan tanah berhimpitan apabila orang berbicara tentang hak milik atau kepunyaannya, maka yang dimaksudkan olehnya adalah barang yang dikuasai sepenuhnya dan yang dapat dinikmati sepenuhnya pula. Selain itu, tidak dibedakan antara benda yang menjadi objek hak milik dengan hak atas benda tersebut. Benda yang dikuasai itulah yang merupakan tanda bukti miliknya.⁴¹

⁴⁰ Fikky Fuad, Artikel, *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*, h. 47

⁴¹ *Ibid.* h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Terciptanya Hak Ulayat

Hak ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugrahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Bagi masyarakat hukum adat, hak ulayat dapat tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya dan menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

b. Pemegang hak ulayat

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang terjadi karena teritorial dalam artian para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, namun ada pula yang karena genealogi yang dimana warga terikat karena pertalian darah.

c. Tanah yang menjadi objek

Tanah yang menjadi objek adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Dan dapat diketahui secara mudah dengan batas-batas wilayah tanah ulayatnya.¹⁸ Dalam hukum adat juga mengatur hubungan antara ketua adat, masyarakat dan Individu-individu sebagai anggota masyarakat dengan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Menurut konsepsi hukum adat, tanah menjadi milik bersama masyarakat atau yang lebih dikenal dengan hak ulayat yang mengandung 2 unsur yang beraspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum keperdataan dan hukum publik. Hak ulayat ini merupakan hak yang tertinggi kedudukannya.⁴²

- 1) Unsur Kepunyaan yaitu semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan.
- 2) Unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya yang dilimpahkan kepada seorang Kepala Adat.
- 3) Kedudukan Hak Ulayat dalam Perundang-Undangan

Dengan berlakunya UUPA maka hukum tanah yang digunakan pada masa pemerintahan penjajahan belanda memang tidak berlaku. Pada masa itu tidak semua ketentuan hukum mengenai tanah merupakan peraturan hukum tanah, contoh: lembaga jual beli tanah ada yang diatur oleh KUHPerdara tertulis, dan ada yang diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis. Dalam sistem jual beli memuat pasal 1457 KUHPerdara, merupakan perjanjian yang mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain dalam kaitan dengan jual beli tanah R.V. Eigendom, R.V Erfpacht, R.V. Opstal. Perjanjian jual beli tersebut belum mengubah hak apapun atas hak yang bersangkutan. Walaupun pembeli sudah membayar penuh harganya, dan tanahnya secara nyata sudah diserahkan kepada pembeli. Ketentuan ini tidak berbeda berlakunya terhadap bendabenda lain yang bukan tanah.⁴³

⁴² Samun Ismaya, *Pengantar hukum Agraria*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011) h. 49

⁴³ Rusmadi, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*,(Jakarta: Mandar Maju,2007)h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak atas tanah baru beralih kepada pembeli apabila secara yuridis telah dilakukan penyerahan (juridische levering pasal 616 dan pasal 620 BW), dimana akte van transport tersebut dilakukan dihadapan notaris dan deregister pada pejabat penyimpan hypotheek.⁴⁴

Namun yang berlaku sejak tahun 1848 penyerahan yuridis wajib dilakukan dihadapan Overschrijvings (pejabat baliknama) yang bertugas membuat akte van transport dan melakukan pendaftarannya. Hukum adat tidak mengenal perjanjian obligatoir dan penyerahan yuridis. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak secara kontan dan penyerahan nyata dilakukan pada saat yang sama dilakukannya pembayaran. Sifat hukum adat yang komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual yang mengandung unsur kebersamaan.

Hukum tanah nasional mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 UUPA. Dalam kenyataannya pada waktu ini, banyak di daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaanya didasarkan kepada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya.

⁴⁴ Ibid,h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menentukan hal tersebut diperlukan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.⁴⁵

Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (Subjek Hak) dan Tanah/Wilayah tertentu (Objek Hak). Hak Ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, persediaan dan pemeliharaan Tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu)
- c. Mengatur dan mendapatkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah). UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat. Tetapi dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat itu harus dilihat pada tiga hal, yaitu:
 - 1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak Ulayat.
 - 2) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraum yang menjadi Objek Hak Ulayat.

⁴⁵ Rusmadi, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007) h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya Hak Ulayat.⁴⁶

Sedangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dalam Pasal 4 ayat 1 persyaratan bisa dikatakan masyarakat adat jika :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
- c. Ada wilayah hukum adat yang masih ditaati
- d. Ada pranata dan perangkat Hukum yang masih ditaati.

Hak Purba Persekutuan Hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No. 5/1960) Dalam pasal 3 dinyatakan : "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan

⁴⁶ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi.

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut : “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UndangUndang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.

Ini berarti berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan pemerintah. Jika pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan hutan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyekproyek besar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum itu dapat menghambat dan menghalangi sesuatu, maka kepentingan umum akan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan: dengan kata lain kepentingan suatu masyarakat harus tunduk kepada kepentingan nasional dan negara.⁴⁷

⁴⁷ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam memori penjelasan ditegaskan: “tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih memepertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.

Jika dipertahankan sikap demikian, maka ini bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 UUPA yang berbunyi: “

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33/3 UUD dan hal-hal sebagaiyang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa , termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Tetapi penguasaan ini memang harus “Digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Hukum Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”⁴⁸

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya , sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur

⁴⁸ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Palu: Sinar Grafika, 2006) h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru.

Dalam rangka hukum tanah nasional, tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas dan kewenangan negara Republik Indonesia, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Dalam kenyataannya hak ulayat kecenderungannya berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu, hak ulayat tidak akan diatur UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, Karena pengaturan hak tersebut akan berakibat pada kelangsungan keberadaanya.

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar karena Hak Ulayat beserta Masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia.⁴⁹

Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa dengan mengingat dalam pasal 1 dan 2 hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat

⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturanperaturan lain yang lebih tinggi. Disini jelas bahwa hak ulayat itu diakui dengan pembatasan tertentu yaitu mengenai eksistensi dan pelaksanaannya.⁵⁰

B. Penguasaan Hak Atas Tanah

1. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa sebagaimana yang diatur dalam uraian 111 B dan 122 Undang-Undang Pokok Agraria. Sifat dari kewenangan tersebut bersifat Publik. Hal tersebut didasari dari keberhasilan kaum komunis Rusia berhasil merebut kekuasaan dari Tsar. Mereka berpendapat bahwa kepemilikan tanah dikuasai oleh negara dimana tidak dimungkinkan adanya kepemilikan pribadi. Tugas negara dalam hal agraria dapat meliputi kewenangan dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan-kewenangannya.⁵¹

Tanah-tanah Negara dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Tanah Negara yang bebas (*Vrij Landsdomein*), adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya, berdasarkan hak menguasai dari negara atas tanah, negara mempunyai

⁵⁰ Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001) h. 55

⁵¹ Siti Zumrokhatus & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, (Semarang: DUNIA CERDAS) h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan penuh untuk dapat memberikannya dengan suatu hak kepada warga negara Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implentasi, atau badan hukum menurut keperluan dan peruntukannya.

2. Tanah Negara yang tidak bebas (Onvrij Landsdomein) adalah hak menguasai negara atas tanah tidak boleh mengesampingkan hak-hak atas tanah yang telah dipunyai oleh warga negara Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum.⁵²

Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia baik tanah-tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian Tanah-tanah yang dihaki oleh hak ini secara administrasi disebut juga dengan tanah negara. Negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pengelola sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan SDA nasional. Maka negara berkewajiban untuk :

- a. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air dan serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

⁵² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencegah rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi dan air.
- d. Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.

Rumusan Pembatasan kekuasaan Negara atas tanah UUPA Pasal 2

Ayat (2)

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan

1. Pengertian dan Penyebab Sengketa Pertanahan

Dalam dimensi hukum, tanah merupakan benda yang termasuk dalam hak-hak sosial manusia yang memerlukan penguatan hukum agar dapat dipertahankan kepada pihak lain. Hal ini dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia sebagai pribadi maupun masyarakat, bagi pembangunan serta bagi negara.⁵³

⁵³ Rusmadi Murad, *Menyingkapp Tabir Masalah Pertanahan, Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007) h.60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960, yaitu:

1) Untuk menjamin Kepastian Hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.⁵⁴

Dengan adanya kepastian hukum maka subyek dapat melaksanakan isi hak atas tanahnya dengan aman dari gangguan pihak lain. Dengan kata lain implikasinya menghindari sengketa di bidang pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan kepemilikan atau penguasaan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

⁵⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi:

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih 1 orang.
- e. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.⁵⁵
- g. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.
- h. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- i. Putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Sebagaimana diketahui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 2, mengenai Hak Menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa:⁵⁶

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
- b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan Bumi, Air dan ruang angkasa

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 1991) h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut , walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk penyelesaian konflik atau sengketa adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangannya diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pada Pasal 4 yaitu: “Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif dari Kementrian, atau
- b. Pengaduan Masyarakat”⁵⁷

Dalam hal ini Kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu, pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Badan Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN terhadap pengaduan dan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik. Perlu disadari pula bahwa penyelesaian dari pengaduan tidak dapat dilakukan dari satu aspek hukum saja, disamping itu dalam koordinasi penanganan penyelesaian sengketa tersebut, Badan Pertanahan Nasional membentuk tim penanganan sengketa pertanahan secara terpadu dengan instansi terkait

⁵⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tim bersama penyelesaian sengketa pertanahan dengan sub komisi pertanahan, Komisi II, DPR-RI.⁵⁸

Dengan kelembagaan yang disediakan tersebut di atas diharapkan sengketa-sengketa pertanahan yang diajukan dapat ditangani secara obyektif, terpadu dan tuntas. Dalam rangka supremasi hukum, kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan terutama didasarkan pada aspek yuridis. Namun demikian dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang bersifat strategis juga dipertimbangkan berdasarkan aspek sosial, ekonomi, politik, pembangunan nasional, maupun aspek perlindungan aset negara dan konservasi sumber daya alam.

Dari perkembangan sengketa pertanahan dewasa ini terlihat adanya pergeseran yang menonjol yaitu antara lain adanya kecenderungan

- a. Sengketa pertanahan yang melibatkan rakyat banyak daripada secara individual
- b. Luasan tanah yang dituntut biasanya dalam skala besar, misalnya Hak Guna Usaha.
- c. Dalam menuntut haknya mempergunakan cara yang demonstratif dengan mengadakan penekanan (preassure) Kepada Badan Pertanahan Nasional.

Dalam rangka penanganan sengketa pertanahan yang diajukan, secara hierarkis dilakukan oleh:⁵⁹

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota oleh Sub. Seksi Penyelesaian masalah pertanahan
- Kantor Wilayah BPN Provinsi oleh Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- Badan Pertanahan Nasional, secara struktural ditangani oleh 4 (empat) Sub Direktorat yang secara fungsional dikoordinasikan oleh ketua sekretariat penanganan sengketa pertanahan, yaitu
- Penyelesaian Sengketa Hukum pada Direktorat Pengadaan tanah Instansi Pemerintah, Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan.
- Penyelesaian Sengketa Hukum pada Direktorat Pengurusan Hak Atas Tanah, Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan.
- Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah pada Deputy Bidang Informasi Pertanahan, Penyelesaian Masalah Ganti Rugi pada Deputy Bidang Tata Laksana Pertanahan.

Adapun penanganan sengketa pertanahan dapat mempergunakan lembaga-lembaga penyelesaian berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 41 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, lembaga mediasi, lembaga negosiasi dan lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dalam menangani sengketa tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan koordinasi antar stakeholder serta konsultasi dengan instansi terkait.

D. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Keneth Prewitt yang dikutip oleh Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun menaatinya yang terkena kebijakan itu.

Suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki 4 (empat) unsur yaitu:

1. Adanya pernyataan kehendak. Ini berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas. Ini berarti ada kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau asosiasi, terlepas dari mana kewenangan itu diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses demokratis.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan. Pengaturan yang dilakukan berdasarkan pada keberlakuan teori melalui kegiatan administrasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melalui kegiatan pengelolaan, dan melalui penuangan kehendak lewat peraturan perundangan yang berlaku.

4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status.⁶⁰

Pemerintah mempunyai peran dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam upaya pelayanan pada masyarakat. Kebijakan merupakan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

⁶⁰ Faried Ali & Andi Syamsul, *Studi Kebijakan Pemerintahan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2012) h. 8-9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penyelesaian diatas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat antara masyarakat Desa Pulau Birandang dengan PT.Surya Palma belum berjalan dengan maksimal karena permasalahan tersebut belum terselaikan oleh Pemerintah Daerah.
2. Faktor penyebab sengketa tanah ulayat tersebut adalah perubahan pola pemikiran atau penguasaan atas tanah adat tidak ada pemikiran yang tegas dalam penegasan hak tanah ulayat dan adanya perbedaan persepsi mengenai status tanah adat antara pemerintah dan masyarakat adat.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut;

1. Perlu adanya transparansi oleh Pemerintah Daerah terhadap mengelolahan lahan dan terhadap penerbitan izin perkebunan di daerah sekitar tanah yang sebelumnya di kelola oleh masyarakat setempat agar masyarakat mengetahui status tanah tersebut, dan perlu adanya penelitian kembali secara mendalam terhadap eksistensi masyarakat adat di Desa Pulau Birandang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah Propinsi Riau agar memberi kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan masalah tersebut karena konflik yang terjadi bukan hanya dengan Masyarakat Desa Pulau Birandang, tetapi juga terhadap Pemerintah kabupaten dimana adanya perbedaan pendapat terhadap status tanah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boedi Harsono, *"Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan"*, (Jakarta: 2008)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, (Jakrta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Ahmad Fauzie Ridwan, *"Hukum Tanah Adat-Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila"*,(Jakarta: Dewaruci Press,1982)
- A.Ridwan Halim.,*Hukum Adat dalam Tanya Jawab*.(Ghalia Indonesia,Jakarta:1987)
- Ali Achmad Chomzal, *"Hukum Agraria"*, Jilid I, (Jakarta: Prestasi Pustaka , 2004)
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,1990)
- Budi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Djambatan: Jakarta, 2003)
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*,(Jakarta: Pradnya Paramita,1975)
- Faried Ali & Andi Syamsul, *Studi Kebijakan Pemerintahan*,(Yogyakarta: UNY Press, 2012)
- Hilman Hadikusumo.,*"Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat"*,dalam Salindeho,Jhon, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*,(Sinar Grafika,Jakarta:1987)
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*,(Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Inu Kencana.Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia,(Bandung: Bumi Aksara, 2003)
- Maria SW Sumardjono,*Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implentasi*, (Jakarta:Kompas Media Nusantara,2001)
- Samun Ismaya, *Pengantar hukum Agraria*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011)
- Sunaryati Hartono, *Pengaturan Hak Ulayat Dalam UUPA Yang baru. Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Siti Zumrokhatun & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, (Semarang: Dunia Cerdas, 2014)
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Sinar Grafik, Palu, 2016)
- Rusmadi, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII pres, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Rajawali, 1990)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Alfabeta, 2014) cetakan 2
- Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Wignyodipoero Soeroyo. *Pengantar dan Azas-Azas hukum Adat*. (Jakarta: Gunung Agung. 1985)

INTERNET

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/sejarah> Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui Tanggal 20 November 1949. Selanjutnya 20 tanggal 20 Februari, Kampar yang 20 setiap 20 tahun 2 diperingati.

<http://www.hukumonline.com> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (diakses pada 11 April 2012).

Regionalinvestment.bkpm.go.id Profil Kabupaten Kampar (diakses pada 11 April 2012)

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 Mei 2017

Fikky Fuad, Artikel, *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*,

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang N0.12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT DESA PULAU BIRANDANG DENGAN PT.SURYA PALMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : **EMEL SALIM**
NIM : **11527104537**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H.Erman M.Ag

Sekretaris
Joni Alizon,S.H.,M.H

Penguji I
Dr. Aslati, M.Ag

Penguji II
Asril S.H.,M.H

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jahinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5220/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Kepada
Yth. Firdaus, SH, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : EMEL SALIM
NIM : 11527104537
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT DESA PULAU BIRANDANG DENGAN PT. SURYA PALMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 1999 TENTANG HAK TANAH ULAYAT"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41875
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3902/2021 Tanggal 4 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

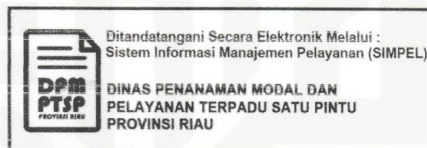
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | EMEL SALIM |
| 2. NIM / KTP | : | 11527104537 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT DESA PULAU BIRANDANG DENGAN PT.SURYA PALMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG HAK TANAH ULAYAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PT. SURYA PALMA DESA PULAU BIRANDANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Juni 2021



Tembusan :

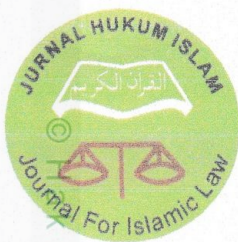
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT Surya Palma Sejahtera di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : EMEL SALIM
NIM : 11527104537
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT
 ANTARA MASYARAKAT DESA PULAU BIRANDANG DENGAN
 PT.SURYA PALMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 1999 DI DESA PULAU BIRANDANG
 KECAMATAN KAMPAR.

Pembimbing : Firdaus SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

An. Pimpinan Redaksi



Mr. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Nama lengkap Emel Salim , lahir pada tanggal 06 Mei 1996 Aur Sati. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Merupakan anak dari pasangan Hasan Basri dan Ibu Sumiati di Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD) dan menyelesaikannya pada tahun 2008 . Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Stanawiyah Ppica Kampar Pondok Pesantren Islamic Center al-hidayah kampar dan menyelesaikannya tahun 2011. Penulis melanjutkan Pendidikan di SMA 02 Kampar yang selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SBMPTN, dan penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada Tahun 2017, penulis melakukan magang di Pengadilan Agama Bangkinang . Pada bulan Juli sampai Agustus 2018 penulis melakukan KKN di Kelurahan Rambah Samo Rokan Hulu.

Dalam masa perkuliahan penulis aktif di beberapa organisasi internal kampus. Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul *“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Desa Pulau Birandang Dengan Pt.Surya Palma Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar”*. Akhirnya tepat pada tanggal 27 Juli 2021 di munaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).